



# Pastikan Lurah Familiar Dengan Data

## Prevalensi Stunting Ditarget Turun Hingga di Bawah 10 Persen

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta menargetkan angka prevalensi stunting bisa segera ditekan hingga di bawah 10 persen. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari data stunting yang bisa diakses semua perangkat daerah Pemkot Yogyakarta, sampai pelibatan seluruh perangkat daerah untuk mencegah dan menangani stunting.

"Target dari Pak Wali Kota menjadi satu digit atau di bawah 10 persen. Karena di Bali bisa di bawah 10 persen. Target stunting secara nasional 18 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, Minggu (15/6).

Berdasarkan data Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB) di Jogja Smart Service (JSS) per 20 Mei 2025, data stunting berada di angka 10,49 persen, *wasting* (gizi kurang/kurus) di angka 5,77 persen, dan *underweight* (berat badan kurang-sangat kurang) di angka 11,58 persen.

Dinkes Kota Yogyakarta mencatat, sebaran stunting terjadi di sejumlah kelurahan, antara lain di Kelurahan Pringgokusuman, Baciro, Ngupasan, Purbayan, Prengan, Kotabaru, Notoprajan, Patehan, Wirogunan, dan Mantrijeron.

Sedangkan sebaran *wasting* antara lain di Kelurahan Cokrodiningratan, Gowongan, Tegalrejo, Demangan, Klitren, Rejowinangun, Tegalpanggung, dan Suryodiningratan. "Underweight antara lain di Kelurahan Giwangan, Sorosutan, Karangwaru, Prawirodirjan, Patangpuluhan, Bener, Warungboto, Pandeyan, Brontokusuman dan Sosro-

### KEROYOK PENANGANAN STUNTING

- Pemkot Yogyakarta menargetkan angka prevalensi stunting bisa segera ditekan hingga di bawah 10 persen.
- Saat ini, stunting di Kota Jogja berada di angka 10,49 persen, *wasting* 5,77 persen, dan *underweight* 11,58 persen.
- Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Jogja diminya 'mengeroyok' penanganan stunting.
- Para pemangku kebijakan dari tingkat kelurahan harus memantau kondisi stunting dan penanganannya

menduran," jelasnya.

Emma pun menyampaikan, intervensi stunting dari instansinya, yang tercakup dalam intervensi spesifik sektor kesehatan, menyumbang sekitar 30 persen. Misalnya, pemberian makanan tambahan dengan alokasi sekitar Rp72,8 juta per kelurahan, lalu pemantauan kesehatan emaju putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi.

"Sementara, intervensi sensitif atau faktor luar atau tidak langsung, memiliki pengaruh 70 persen terhadap stunting. Faktor luar ada lingkungan dan makanan. Makanya, penanganannya harus keroyokan sesuai tupoksi masing-masing. Melibatkan wilayah kelurahan, kemandren, puskesmas dan TPK (Tim Pendamping Keluarga)," urai Emma.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 'mengeroyok' penanganan stunting. Pengaruh nutrisi dan kondisi kesehatan hanya

30 persen, sedangkan faktor lain seperti lingkungan pengaruhnya mencapai 70 persen.

"Jadi, Dinas PUPPKP, DLH, Dinsos, semuanya punya peran besar terhadap masalah stunting. Saya minta Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk membagi data (stunting) kepada lurah-lurah dan dinas," tandasnya.

Menurutnya, pemangku kebijakan di tingkat kelurahan harus memantau kondisi stunting dan penanganannya, seperti pemberian tambahan makanan untuk balita stunting. Dengan begitu, ketika ditemui potensi kasus stunting di wilayahnya, lurah bisa segera melapor untuk ditempuh upaya-upaya penanganan dan pencegahan.

"Lurah-lurah harus tahu berapa yang stunting, baduta dan balita di bawah garis normal berat badannya, untuk mencegah stunting. Untuk membuat lurah familiar dengan data, ini butuh disinkronkan," urai Hasto. (aka)